

LAPORAN



**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN AGAMA MAROS
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	3
1.4. Rencana Kerja	3
BAB II	6
METODOLOGI	6
2.1. Metode Penelitian	6
2.2. Populasi Dan Sampel	6
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	6
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	7
2.5. Teknik Analisis Data	7
2.6. Tahapan pelaksanaan	8
BAB III	10
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	10
3.1. Profil responden	10
3.2. Indeks persepsi korupsi perindikator	12
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	16
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan	18
BAB IV	20
PENUTUP	20
4.1. Kesimpulan	20
4.2. Rekomendasi	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2016 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 261 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Peradilan Agama. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Agama yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu

memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan dilingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi
- d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- f) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan
- g) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Ri
- h) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor 59A/SEK/SK/11/2014 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Sgung Dan Peradilan Di Bawahnya
- i) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Ri Nomor 261 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pe,Bangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Di Lingkungan Peradilan Agama
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- k) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- l) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
- m) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
- n) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi

- o) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 5 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan ditempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.

- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Agama Maros.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Koordinator Teknikal). Koordinator Teknikal akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan

Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
U1	Hadiah/Gratifikasi
U2	Pungutan Liar/Pungli
U3	Percaloan
U4	Perbuatan Curang
U5	Upaya Pencegahan KKN

Tabel 3

Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil Responden

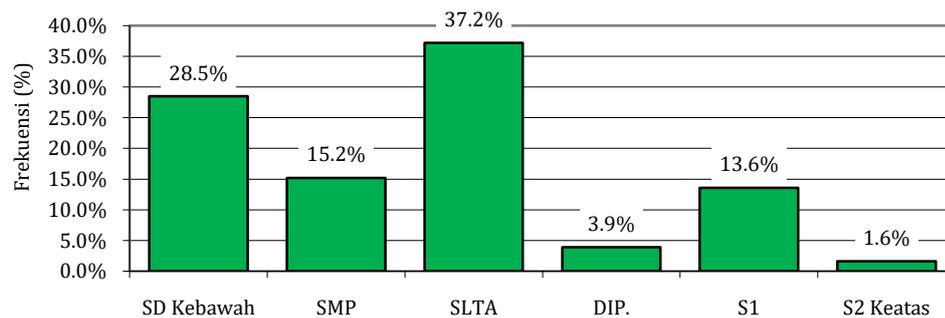
3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maros mayoritas memiliki latar pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	
		F	%
1.	SD Kebawah	88	28,48
2.	SMP/SLTP	47	15,21
3.	SLTA	115	37,22
4.	Diploma (D1/D2/D3/D4)	12	3,88
5.	Sarjana (S1)	42	13,59
6.	S2 Keatas	5	1,62
TOTAL		309	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



3.1.2. Pekerjaan Responden

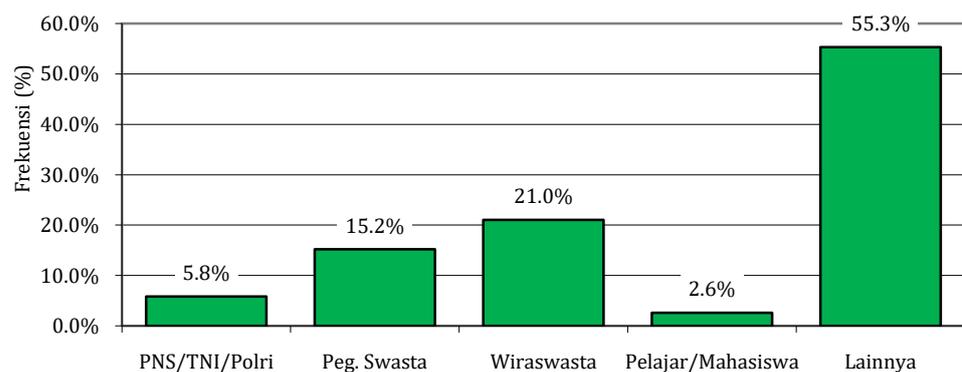
Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 55,34% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maros

memiliki pekerjaan sebagai lainnya (Petani, Nelayan, Buruh Bangunan, dll).

Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden

No.	Pekerjaan	Frekuensi	
		F	%
1.	PNS/TNI/Polri	18	5,83
2.	Pegawai swasta	47	15,21
3.	Wiraswasta	65	21,04
4.	Pelajar/Mahasiswa	8	2,59
5.	Lainnya	171	55,34
TOTAL		309	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



3.1.3. Kelompok usia responden

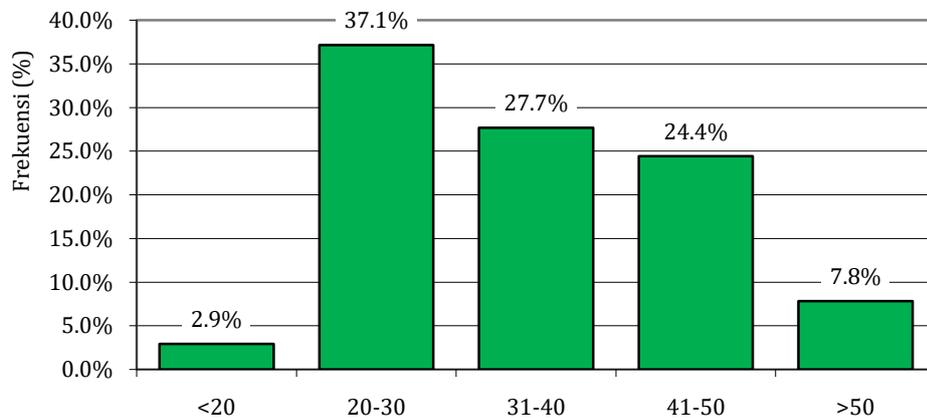
Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja Pengadilan Agama Maros berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 20 tahun s.d 29 tahun. Bagi kelompok usia di atas 50 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di bawah 20 tahun.

**Tabel 7.
Usia responden**

B

No.	Usia	Frekuensi	
		F	%
1.	<20	9	2,93
2.	20-30	114	37,13
3.	31-40	85	27,69
4.	41-50	75	24,43
5.	>50	24	7,82
TOTAL		309	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



3.2. Indeks persepsi korupsi perindikator

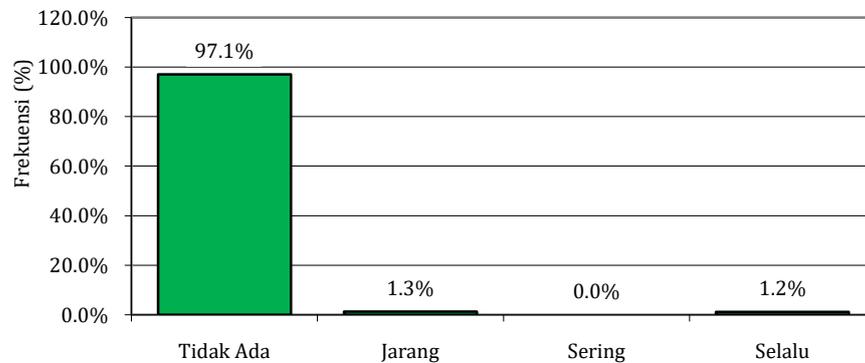
3.2.1. Indikator Pemberian Hadiah/Gratifikasi

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Pemberian Hadiah/Gratifikasi ini menunjukkan hasil pada index “Tidak Ada” Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja Pengadilan Agama Maros bersih dari Pemberian Hadiah/Gratifikasi.

Tabel 9.
Indeks pada indikator Pemberian Hadiah/Gratifikasi

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Ada	4	300	100
2.	Jarang	3	4	1,29
3.	Sering	2	0	0
4.	Selalu	1	5	1.16
TOTAL			309	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



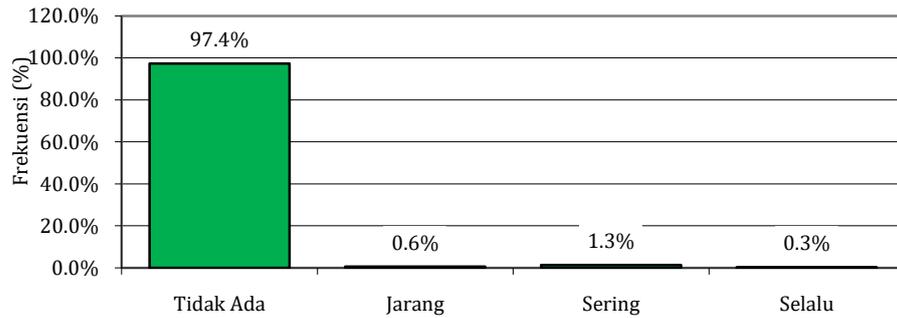
3.2.2. Indikator Pungutan Liar/Pungli

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Pungutan Liar/Pungli ini menunjukkan hasil pada index“Tida Ada” Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja Pengadilan Agama Maros bersih dari Pungutan Liar.

Tabel 10.
Indeks pada indikator Pungutan Liar

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Ada	4	301	97,41
2.	Jarang	3	2	0,64
3.	Sering	2	4	1,29
4.	Selalu	1	1	0,32
TOTAL			309	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



3.2.3. Indikator Percaloan

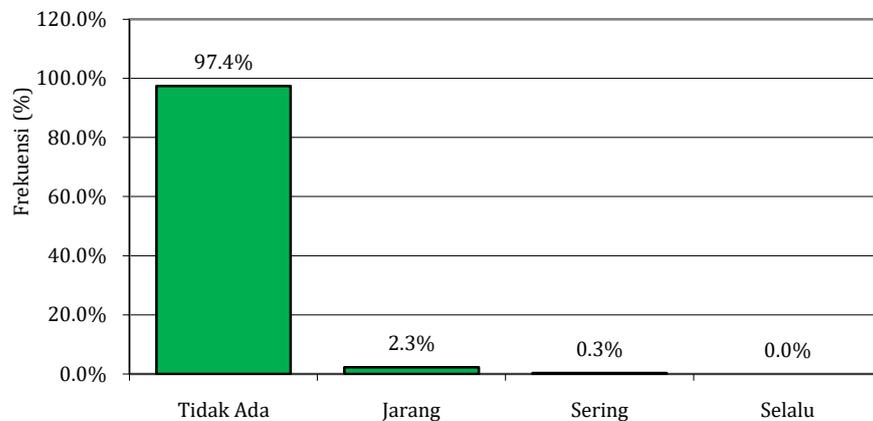
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index “Tidak Ada”.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maros terbebas dari Percaloan.

Tabel 11.
Indeks pada indikator Percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Ada	4	301	97,41
2.	Jarang	3	7	2,26
3.	Sering	2	1	0,32
4.	Selalu	1	0	0
TOTAL			309	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



3.2.4. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index“Tidak Ada”.

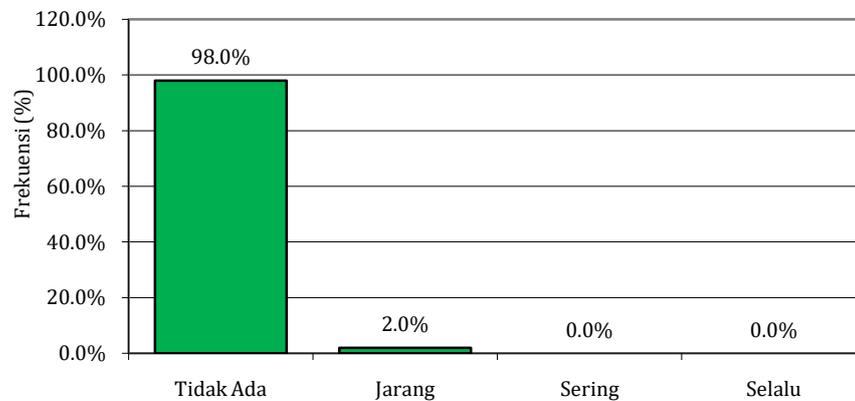
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Marosterbebasdari Perbuatan Curang.

Tabel 12.

Indeks pada indikator Perbuatan Curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Ada	4	305	98
2.	Jarang	3	4	2
3.	Sering	2	0	0
4.	Selalu	1	0	0
TOTAL			309	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



3.2.5. Indikator Upaya Pencegahan KKN

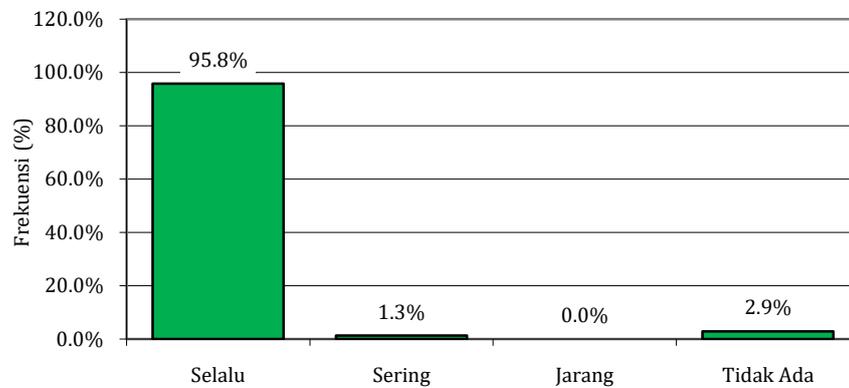
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Upaya Pencegahan KKN ini menunjukkan hasil pada index “Selalu”.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maros telah menerapkan Upaya Pencegahan dari KKN

Tabel 13.
Tabel indeks pada indikator Upaya Pencegahan KKN

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	4	296	95,79
2.	Sering	3	4	1,29
3.	Jarang	2	0	0
4.	Tidak Ada	1	9	2,91
TOTAL			309	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



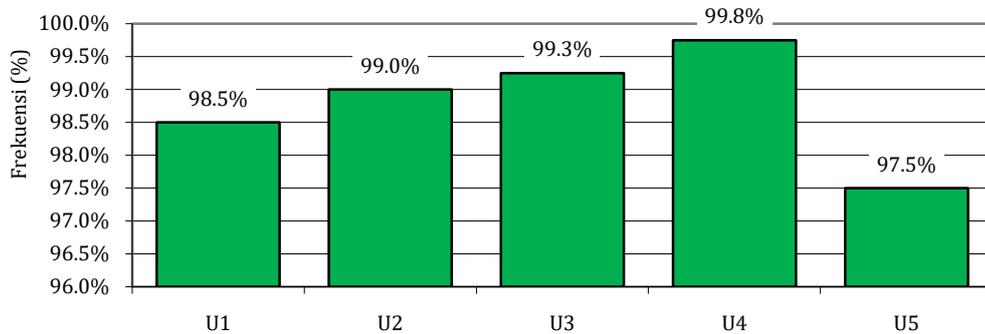
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maros

Dari indeks 5 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Agama Maros sebesar 3.99 dengan indikator terbesar pada Perbuatan Curang

Tabel 14
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maros

No.	Indikator	Frekuensi		Peringkat
		F	%	
1.	Pemberian Hadiah/Gratifikasi	3,94	98,5	4
2.	Pungutan Liar	3,96	99	3
3.	Percaloan	3,97	99,25	2
4.	Perbuatan Curang	3,99	99,75	1
5.	Upaya Pencegahan KKN	3,90	97,5	5
RATA-RATA		3,95	98,75	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Indeks persepsi korupsi tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 3.26 – 4.00, yaitu dengan skor sebesar 3.95 dimana nilai indeks persepsi korupsi yang dipersyaratkan adalah lebih atau sama dengan (\geq) 3.6.

Tabel 15
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maros

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maros

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maros

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 16
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maros

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maros
1	Layanan pada Pengadilan Agama Maros telah memberikan kemudahan akses bagi pengguna layanan secara cepat dan tepat, namun tetap harus memperhatikan kenyamanan pengguna layanan
2	Petugas yang memberikan Layanan pada Pengadilan Agama Maros telah memberikan pelayanan yang prima dan handal, dan selalu meningkatkan kerapihan serta kedisiplinan
3	Fasilitas Layanan pada Pengadilan Agama Maros telah lengkap dan memenuhi standar pelayanan namun tetap harus memperhatikan perkembangan teknologi informasi dimasyarakat
4	Pengadilan Agama Maros telah memberikan layanan secara informatif dan akuntabel bagi pengguna namun tetap harus dilakukan secara terus-menerus sehingga pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan informasi mengenai layanan di Pengadilan Agama Maros

5	Layanan di Pengadilan Agama Maros telah sesuai dengan peraturan dan SOP, diharapkan kepada pejabat yang berwenang untuk selalu meningkatkan pengawasan kepatuhan terhadap peraturan dan SOP
---	---

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Agama Maros diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Agama Maros memiliki Indeks Persepsi Korupsi “3.95” termasuk pada kategori **Bersih Dari Korupsi**.

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Agama Maros Tahun 2020 tersebut diatas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3.26 atau masuk pada persepsi Bersih dari korupsi Namun dari lima indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Upaya Pencegahan KKN memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya, itu artinya masih perlu pembenahan pada area tersebut.